



## Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)

Mafturrahman<sup>1\*</sup>, Aria Elshifa<sup>1</sup>, Ary Dwi Anjarini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Perkantoran, Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, Indonesia

\*Corresponding author email: [mafturrahmansos@gmail.com](mailto:mafturrahmansos@gmail.com)

### History Article

#### Article history:

Received January 22, 2024

Approved March 14, 2024

#### Keywords:

*Transparency, participation, village development*

#### ABSTRACT

*Openness of public information, community participation and village development are the expectations of everyone, as well as the village community of Kedungwuni Sub-district, Pekalongan Regency. However, everything must be supported by adequate human resources and be able to understand their rights and obligations based on the applicable laws and regulations. The purpose of this research is to analyze and explain the importance of public information disclosure and community participation in village development. This research method uses a qualitative method with descriptive analysis. To analyze and explain the existence of public information disclosure, community participation in village development in Kedungwuni District, Pekalongan Regency. The results of this study, namely: The village government in opening public information has been carried out with the existence of village information boards and village websites. However, community participation is still quite low, so it does not significantly affect village development. Based on the findings of this study, the authorities should make the best innovations so that the village community has the awareness to participate in village development activities.*

#### ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik, adanya partisipasi masyarakat dan pembangunan desa adalah harapan semua orang, begitu juga dengan masyarakat desa Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Namun semuanya harus didukung oleh SDM yang memadai serta dapat memahami hak dan kewajibannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan menjelaskan pentingnya keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk menganalisa dan menjelaskan adanya keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Adapun hasil penelitian ini, yakni pemerintah desa dalam membuka informasi publik sudah dilakukan dengan adanya papan informasi desa maupun website desa. Namun partisipasi masyarakat masih cukup kurang rendah, sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembangun desa. Berdasarkan temuan penelitian ini agar pihak yang berwenang melakukan inovasi-

---

inovasi terbaik agar masyarakat desa memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

---

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

*How to cite:* Mafturrahman, M., Elshifa, A., & Anjarini, A. D. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 416–423. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265>

---

## PENDAHULUAN

Pentingnya keterbukaan informasi publik dalam lembaga pemerintahan desa, untuk mengukur terwujudnya pemerintahan yang baik. Selaras dengan hasil penelitian keterbukaan informasi publik dalam rangka terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta upaya yang dapat dilakukan oleh komisi informasi publik baik di tingkatan pusat ataupun wilayah dalam mendesak keterbukaan informasi publik serta terwujudnya masyarakat informasi di Indonesia (Ricky 2022).

Transparansi birokrasi atau open government adalah salah satu kebutuhan dasar di era teknologi kontemporer, tujuan dari adanya open government ke dalam kebijakan publik merupakan upaya mewujudkan keterbukaan, partisipatif dan akuntabel (Wahyudi 2021). Tanpa adanya informasi publik yang terbuka, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk mengetahui aktivitas birokrasi. Selaras dengan hasil penelitian mengenai keterbukaan informasi publik desa di Kecamatan kedungwuni Kabupaten Pekalongan jika ingin dilihat sempurna, maka harus dipenuhi berbagai aspek, diantaranya asas transparansi, asas partisipasi, asas akuntabilitas dan asas reponsibilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mafturrahman et al. 2022).

Kreteria pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang yang menjalankan kebijakannya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang berinovasi untuk membuka informasi publik, baik secara manual di papan pengumuman, maupun melalui media sosial atau website. Diantara sekian hal pemerintahan desa melaksanakan pembangunan desa dalam hal ini melakukan pembangunan fasilitas, prasarana serta sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, dengan pembangunan fasilitas prasarana tersebut hingga kegiatan ekonomi publik bertambah dan memberikan dampak baik untuk kenaikan kesejahteraan masyarakat desa (Rohmat Polinus, Emanuel Zebua 2022).

Rendahnya keterbukaan informasi publik diberbagai bidang saat ini, padahal pilar-pilar good governance harus direalisasikan oleh penyelenggara pemerintahan, karena birokrasi memiliki struktur dan kewenangan dalam melaksanakannya. Namun berdasarkan hasil survey lapangan kepada masyarakat di desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli ada beberapa hal yang mempengaruhi kurang cepatnya kemajuan desa adalah belum banyaknya informasi yang belum disalurkan kepada masyarakat secara menyeluruh dari pemerintahan desa, Sehingga pembangunan belum efektif disebabkan belum terbukanya informasi yang berhubungan dengan program pembangunan di desa, akibatnya publik belum terlalu banyak melibatkan diri dalam pelaksanaan program pembangunan desa, baik itu yang berhubungan dengan program pembangunan infastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat desa (Rohmat Polinus, Emanuel Zebua 2022). Informasi dari pemerintah untuk

masyarakat itu harus selalu di update setiap waktu menurut (Chairunnisa, Habibi, dan Berthanila 2023) bahwa tingkat kebutuhan informasi meningkat ketika informasi tersebut memberikan sesuatu yang berguna bagi pencarinya, seperti penyelesaian suatu masalah atau masalah, memberikan ide-ide baru untuk suatu program baru, suatu kebutuhan informasi, atau tindak lanjut dari suatu masalah yang sedang berlangsung, kemampuan administrasi publik untuk menghasilkan informasi dengan infrastruktur dan konten yang beragam, serta transparansi dan mekanisme dan prosedur yang memadai, mendorong keterlibatan publik atau partisipasi positif, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pertanyaan atau informasi yang membingungkan jika mereka dapat dengan mudah menerima informasi yang cukup.

Penyebab rendahnya keterbukaan informasi publik ialah pemahaman pemerintah yang masih berjalan ditempat, padahal di era digital ini seharusnya penyediaan informasi untuk masyarakat lebih mudah, cepat dan menyeluruh dan selanjutnya kepala desa harus ada inovasi-inovasi yang terbaru dalam upaya penyebaran informasi di desa nya. Karena menurut (Sri Nurhidayati, Syamsumar, Muhammad Yamin 2022) kepala desa mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan kemajuan desa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi seorang kepala desa tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadikan desa semakin maju tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

Karakteristik dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa. Masyarakat harus ikut serta dalam ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah desa dalam berkolaborasi dalam membangun desa. Masyarakat harus memiliki kesadaran yang sama dan peduli terhadap pembangunan desa. Percepatan pembangunan akan cepat dilakukan jika masyarakat ikut bersama pemerintah dalam membangun desa.

Manfaat keterbukaan data publik dan keikutsertaan publik untuk pembangunan desa dalam pelaksanaan program oleh pemerintah, partisipasi publik sangatlah penting dan tanpa keikutsertaan dan dukungan dari masyarakat, pembangunan tersebut sulit untuk berhasil dan memberikan berguna bagi publik (Amalia Yunia Rahmawati 2020). Begitu juga dengan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pembangunan oleh birokrasi pemerintahan keikutsertaan publik sangatlah diperlukan, jika tidak ada partisipasi dan dukungan dari publik, pembangunan akan sulit untuk berhasil dan memberikan manfaat bagi publik, di jaman kebebasan dan keterbukaan informasi ini, partisipasi masyarakat menjadi tangga dalam mendukung kemajuan di daerah, terutama dalam aktifitas Musrenbang, konsep partisipasi publik akan menjadi jiwa dan semangat yang mendasari aktifitas tersebut (Amalia Yunia Rahmawati 2020).

Keterbatasan penelitian berkaitan dengan pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sehingga peneliti memiliki inisiatif dalam melakukan penelitian mengenai keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dan pembangunan desa. Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penelitian mengenai Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa yang dilakukan di Desa Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Pada bulan Oktober 2023 hingga bulan Maret 2024. Penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Metode tersebut Sesuai dengan kontekstual dengan permasalahan pada objek penelitian. Penelitian ini melibatkan Kepala Desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Tokoh Masyarakat sebagai populasi penelitian. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian mengenai

keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa, mulai dari unsur masalah, tujuan dan faktor-faktor sentral yang mempengaruhi konsep tersebut. Dengan konsep keterbukaan informasi publik dan kaitannya dengan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa lalu dapat dianalisis untuk mengetahui keterkaitannya. Data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner, melainkan dari observasi, wawancara langsung dan manuskrip resmi lain yang relevan. Oleh karena itu proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi adalah suatu cara mengakumulasi bahan dengan metode mempelajari langsung kondisi dilapangan penelitian untuk memperoleh bahan yang tepat yang peneliti butuhkan, selanjutnya wawancara adalah suatu proses akumulasi bahan dimana diskusi dan dialog diarahkan langsung kepada responden atau stakeholder untuk mendapatkan sumber bahan yang tepat. Data yang didapatkan pada penelitian ini dikumpulkan dan dirapikan secara tersusun untuk kemudian dianalisis (Chairunnisa, Habibi, and Berthanila 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil Analisis rievew data presepsi tokoh masyarakat dan pemerintah desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan berkaitan dengan kebijakan keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat dan pembangunan desa didapatkan melalui berbagai sumber termasuk wawancara.

### **Keterbukaan Informasi Publik**

Pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi dari pemerintah adalah harapan semua orang. Informasi itu bisa berupa informasi secara online maupun tidak dan masyarakat desa didorong untuk berinteraksi dengan pemerintah yang memiliki wewenang melalui ruang-ruang partisipasi dan kolaborasi yang berorientasi pada pembangunan. Hasil wawancara dengan pemerintah desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam membuka informasi publik sudah dilakukan, dengan adanya papan informasi desa maupun website desa, sehingga membuat masyarakat desa dalam menerima informasi mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa secara efektif. Temuan ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Fiyo Dowi Sinta 2023) terkait transparansi hasil surveinya ia menemukan belum sepenuhnya dilaksanakan karena tidak adanya papan buletin atau papan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat desa dan papan yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Maka dipandang perlu sumber daya manusia (SDM) birokrasi yang handal, yang memiliki inovasi, sehingga dalam hal pelaksanaan kewajibannya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Apa lagi mengenai transparansi. Menurut (Mafturrahman *et al.* 2022) pentingnya keterbukaan informasi publik sangat mempengaruhi keberadaan birokrasi ditengah masyarakat serta pastisipasi masyarakat dalam program pembangunan nasional. Betapa pentingnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa, sebab mempengaruhi banyak hal, terutama kepercayaan publik terhadap penyelenggaran pemerintah desa dan pengelolaan SDM dan SDA yang ada di desa. Begitu urgensinya transparansi informasi publik sehingga menurut (Yuono 2023) bahwa informasi yang jelas dan lengkap transparansi merupakan elemen kunci ketahanan nasional dan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, hak atas informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi adalah salah satu karakteristik terpenting suatu negara serta demokrasi yang melindungi kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang baik.

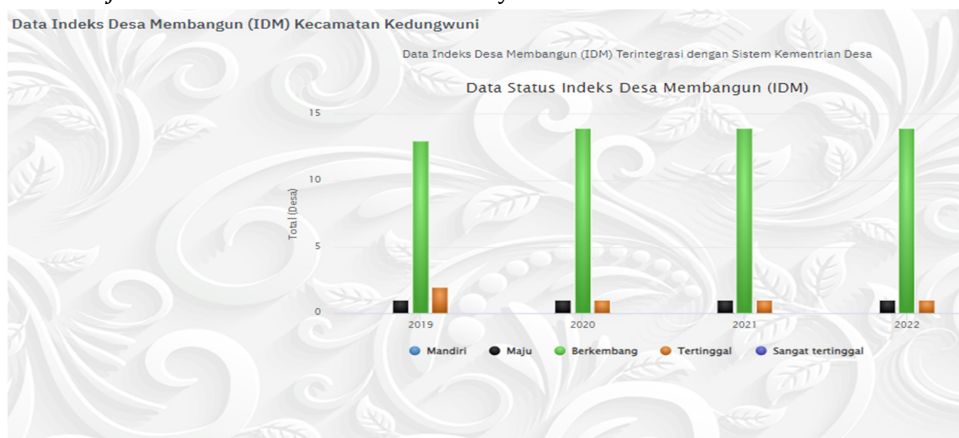
### **Partisipasi Masyarakat**

Maka dipandang perlu adanya keterlibat msyarakat secara aktif dalam rangkain kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Dari hasil wawancara dengan Kepala desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Menurut (Puri Putrini, H. Abdurrahman 2023) partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa sangat penting karena desa merupakan harapan pembangunan nasional. Di era kemajuan dan tantangan saat ini masyarakat desa harus banyak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Jiwa gotong royong masyarakat harus dipertahankan sebab itu kebaikan yang harus dirawat dengan baik. Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi kegiatan pembangunan pemerintahan desa, oleh karena itu dipandang perlu bagi pemerintah desa untuk menghasilkan inovasi-inovasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Menurut (Shinta Dayang Nabilla 2023) keterbukaan dan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan. Tujuan dari partisipasi publik selain dari pada perintah aturan, keberhasilan program pemerintah tidak lepas dari peran masyarakat di dalamnya. Sejalan dengan hasil penelitian (Rego Boby Afrionaldy, Dr. Dra. Rina Martini 2021) kepemimpinan kepala desa Yan Teguh Wibowo meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa Ngale dengan melibatkan masyarakat secara langsung, terbukanya peluang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat baik berupa gagasan, materi maupun tenaga untuk melaksanakan pembangunan desa. Sama dengan hasil penelitian (Sri Nurhidayati, Syamsumar, Muhammad Yamin 2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa Karang Dima dalam pembangunan desa mulai meningkat, peran kepala desa Karang Dima dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa antara lain mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, menyikapi aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program ketahanan pangan, dan faktor penghambat pelaksanaan proses pendataan yaitu kesulitan. pendataan warga yang sibuk bekerja sehingga dapat memperlambat proses pendataan. Sehingga bisa disimpulkan dari beberapa hasil penelitian diatas, bahwa inovasi dan pengetahuan pemerintah desa sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa. Sehingga dipandang perlu pemerintah desa melakukan terobosan baru guna untuk membuka ruang-ruang publik.

### Pembangunan Desa

Dalam data indeks desa membangun di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan jumlah desa maju atau mandiri belum terlalu banyak.



Gambar 1. Sumber <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/idmkec/33.26.13>

Selaras dengan pandangan (Sri Nurhidayati, Syamsumar, Muhammad Yamin 2022) perhatian pembangunan harus di arahkan pada pembangunan kehidupan pedesaan dalam segala aspeknya, karena titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia adalah pedesaan, namun semuanya berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini, situasi ini diperkuat oleh kenyataan, bahwa masyarakat pedesaan masih dilanda keterbelakangan dan banyak ketidakamanan sosial lainnya, sehingga banyak pemerintah desa yang harus memacu semangatnya agar bisa menjadi desa maju atau mandiri. Karena percepatan pembangunan di desa bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa saja, namun kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Begitu juga dengan pandangan (Mohammad Rizki Ismail, Ellys Rachman 2023) Pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh proses perencanaan yang baik, dalam hal ini keberhasilan program pembangunan desa juga bergantung pada perencanaan yang dilakukan, rapat perencanaan pembangunan desa adalah rapat yang diselenggarakan oleh dewan desa, pemerintah desa, dan warga masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal, menyeleksi permasalahan atau keinginan masyarakat yang menjadi kebutuhan masyarakat, keberlanjutan pembangunan desa Musrenbang, program-program yang memang dibutuhkan masyarakat harus terus dipersiapkan dengan baik sehingga nantinya masyarakat desa benar-benar bisa menikmati kehidupan yang layak. Walaupun menurut (Ompusunggu 2017) tidak semua masyarakat Indonesia sama-sama menikmati pembanguana, yang menjadi landasan mewujudkan masyarakat sejahtera dan makmur, hal ini disebabkan oleh faktor geografis, wilayah geografis Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terisolasi, persebaran penduduk yang tidak merata serta akses atau infrastruktur yang tidak merata, walapun demikian tekad dan semangat pemerintah desa tetap utamakan. Sebab menurut (Teuku Al Ichsan, Safuridar 2023) Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam kerangkaotonomi daerah, pembangunan pedesaan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena mengandung unsur pembangunan yang berkeadilan dan hasil-hasilnya serta berdampak langsung pada kepentingan peningkatan kesejahteraan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan selaras hasil penelitian Pembangunan desa merupakan proses yang memajukan kesejahteraan warga dalam jangka panjang, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan pendapatan warga melalui peningkatan produksi (Iqlandia Nazori, and Baining 2023). Desa sebagai misi pembangunan nasional bukan hanya sebagai slogan semata, namun harus dibuktikan dengan realitas kehidupan masyarakat yang sejahtera, desa maju serta mandiri, dibuktikan dengan pendapatan asli desa yang memumpuni. Selaras dengan menurut (Waruwu 2023) membangun desa merupakan usaha untuk melahirkan aset dengan menggunakan modal, SDM, infrastruktur, dan SDA untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, sehingga pemerintah pusat telah mengeluarkan dana yang cukup besar dengan tujuan agar dapat dikelola dengan baik sehingga pembagunan di desa dapat dirasakan mafaatnya oleh masyarakat desa. Dengan demikian pengelolaan anggaran desa harus benar-benar ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi kebutuhan desa masing-masing. Selaras dengan pandangan (Setiawan 2023) yaitu Planing pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa disusun dan ditetapkan dengan peraturan desa, rencana pembangunan merupakan pedoman untuk pendapatan dan belanja desa yang sesuai dengan keputusan dewan BPD untuk berusaha menciptakan suasana yang dapat mendorong kesediaan publik untuk bekerja sama demi pembangunan desa, di sisi lain publik juga berperan aktif dalam kerja pembangunan. Sebab pembangun harus berjalan terus, sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan seluruh pihak di dalamnya. Pembangunan yang berorientasi pada pedesaan

lewat pemberdayaan warga ialah wujud paradigma pembangunan baru pasca tidak terbentuknya pemerataan pembangunan dari paradigma lama (Sukarno, Sugihardjo, and Wibowo 2023). Dapat disimpulkan dari pada banyak hasil penelitian yang serupa, bahwa pembangunan desa adalah harapan semua pihak, baik ditingkat pusat, provinsi dan daerah, lebih-lebih masyarakat desa. Maka dipandang perlu penerapan transparansi, partisipasi untuk pembangunan desa yang ada di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

## KESIMPULAN

Analisis mengenai keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan adalah untuk menjelaskan bagaimana manfaat transparansi, manfaat partisipasi terhadap pembangunan desa. Sehingga dari hasil penelitian diatas bisa menjadikan dasar pengingat antara pemerintah desa dan masyarakat desa, bahwa transparansi, partisipasi terhadap pembangunan desa. Dimana memerlukan satu tekad yang kuat dalam membangun kalaborasi dan sinergitas antara pemerintah desa dan masyarakat desa secara konsisten. Meskipun keterbukaan informasi publik sudah dilakukan, namun partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Maka peneliti dapat memberikan saran dua hal yang harus dilakukan, satu mempertahankan transparansi yang sudah dilakukan bahkan jika ada perubahan kebutuhan masyarakat maka mesti melakukan inovasi-inovasi baru dan yang kedua mesti melakukan langkah-langkah kongrit untuk mengajak, memberikan motivasi kepada masyarakat agar aktif dalam kegiatan-kegiatan yang beroreantasi pada pembangunan sehingga terpenuhi dimensi partisipasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. 2020. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal." (July): 1–23.
- Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, And Rethorika Berthanila. 2023. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2): 31–45.
- Fiyo Dowi Sinta, Risal. 2023. *Jurnal Akuntansi*, "Auditing Dan Investasi ( JAADI ) ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SEPANGAH KECAMATAN AIR." 3(1): 1–7.
- Iqlandia, Rio, M Nazori, And Mellya Embun Baining. 2023. "Meningkatkan pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam ( studi pada desa sungai rambai kecamatan tebo ulu kabupaten tebo )." 2(1).
- Mafturrahman, Aria Elshifa, Budi Nugraha, And Aghus Jamaluddin. 2022. "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)." *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi* 2(2): 1–12.
- Mohammad Rizki Ismail, Ellys Rachman, Tety Thalib. 2023. "Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ( Musrenbangdes ) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo." 3: 9791–98.
- Ompusunggu, Vina. 2017. "Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa." 10(1): 95–102.
- Rego Bobby Afrionaldy, Dr. Dra. Rina Martini, M.Si. 2021. "Tipe Kepemimpinan Kepala Desa Yan Teguh Wibowo Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa." 10: 6.

- Ricky, Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. 2022. “Keterbukaan informasi publik di indonesia (perspektif akuntabilitas , transparansi dan partisipasi ) public information disclosure in indonesia ( accountability , transparency and participation perspective ).” 12(2): 62–75.
- Rohmat Polinus, Emanuel Zebua, Novelina Andriani Zega. 2022. “Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli.” 6(4): 20–27.
- Setiawan, Ferry. 2023. “Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian.” *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 7(1): 48–58.
- Shinta Dayang Nabilla, Faizal Satria Desitama. 2023. “The Influence Of Transparency, Accountability, Community Participation On Village Financial Management In Kaligrejeng Village, Wonotirto Sub-District, Blitar District.” 7: 1347–59.
- Sri Nurhidayati, Syamsumar, Muhammad Yamin, Edrial. 2022. “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(2): 932.
- Teuku Al Ichsan, Safuridar, Rinaldi Syahputra. 2023. “Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( Add ) Dalam Upaya Pembangunan Desa.” 1(1): 162–68.
- Wahyudi. 2021. “Implementasi open government melalui partisipasi masyarakat pada formulasi kebijakan (studi pada raperda penyelenggaraan pesantren di provinsi lampung).”
- Waruwu, Siska Etika Rahmat. 2023. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lasarabaene.” *Journal Economics And Strategy* 4(1): 72–81.
- Yuono, Cipto. 2023. “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 6(2): 418–31.
- <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/Idmkec/33.26.13>